

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Cet. 1. CV. Mandar Maju.
- Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- HAW Widjaja. 2001. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1995. Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara. Bogor.
- Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Miriam Budiardjo. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi. 2015. Implementasi Kebijakan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nandang Alamsyah Dkk, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad Press.
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Nurul Puspita dan Subari Mustar. 2015. Bunga Rampai Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan H.R. 2011. Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan H.R. 2016. Hukum Administrasi Negara. Cet. Kedua Belas. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Robinson Taringan. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini. 2013. Penerapan Tori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Fokusindo. 2013. *Himpunan Peraturan Otonomi Daerah*, Bandung: Fokusindo Mandiri.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

-----Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah daerah.

Keputusan Bupati Muaro jambi Nomor 97/Kep.Bup/Disperkim/2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Verifikasi Penyerahan Prasarana, sarana, dan Utilitas Perumahan di kabupaten Muaro Jambi.

C. Jurnal

Asep Hariyanto. "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang)". *Jurnal PWK Unisba*.

Dewirahmadanirwati. 2018. "Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governancein The West Sumatera Region", *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)* Vol. 2 No. 3.

- Elektison, 2011. "Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta.
- Enrico Gustian Isvarido. 2022. "Kewenangan Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2014", *Limbago: Journal Of Constitutional Law*. Vol. 2 No. 3.
- Leli Yulita. 2020. "Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3.
- Lalu Mulyadi, Edi Hargono D Putranto, dan M. Yekti Pracoyo. 2016. "Analisis Mutu Prasarana Jalan Perumahan di Kabupaten Malang, *Jurnal Info Mapro*, Vol. 7.2.
- Puspa Susilawati dan Djumadi Purwoadmodjo. 2019. "Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang" *NOTARIUS*, Volume 12 No. 2.
- Surya Hadi Kusuma, 2017 "Arahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Kesesuaian Lahan" *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 12, No. 1.
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

D. Sumber Lain

- Pengertian Pelaksaaan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> di akses pada tanggal 19 Maret 2023, Pukul 14:10.
- Totoh W. Tohari. "Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", dikutip dari <http://www.hukumpedia.com> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:20 WIB.
- Pj. Muaro Jambi terima Penyerahan PSU Perumahan dari PT Fajar Makmur Sejahtera <https://lintastungkal.com/pj-bupati-muaro-jambi-terima-penyerahan-psu-perumahan-dari-pt-fajar-makmur-sejahtera/> di akses pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:30.
- 4 Persyaratan Menjadi Developer dan 7 Izin Penting yang Wajib Dipersiapkan <https://www.rumah.com/panduan-properti/persyaratan-menjadi-developer-68696> diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Faisal, S.H selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Erik Ahmad, S.H. selaku Bidang Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara bersama Bapak Jeremias Saragih, SE. selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Jambi Luar Kota pada tanggal 5 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Tamin Darwis, SE. sebagai Pengembang/*Developer* Perumahan Griya Akbar Asri.

Wawancara dengan Bapak Danis sebagai warga Perumahan Griya Akbar Asri. Pada tanggal 1 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Suci Wulandari sebagai warga Perumahan Griya Akbar Asri. Pada tanggal 1 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Aldi merupakan Mahasiswa yang mengontrak di Perumahan Griya Akbar Asri. Pada Tanggal 1 Juni 2023.